

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PERTANIAN KABUPATEN

PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026



DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Januari 2023



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jln. Diponegoro - Painan Telp. / Fax. (0756) 21408

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 520/ 186 /Kpts/DISTAN-PS/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Dinas Pertanian dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Rencana Jangka menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yang spesifik, relevan dan terukur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 165 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum

KEDUA merupakan acuan kinerja yang dipergunakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan untuk menetapkan:

1. Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Penetapan Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Evaluasi Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.;

KETIGA : Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur dalam penilaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 26 Januari 2023

KEPALA DINAS,



MADRIANTO, S.Hut., M.H.

Pembina

NIP. 19780519 200501 1 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN

NOMOR : 520/ 239 /Kpts/DISTAN-PS/2023

TANGGAL : 26 Januari 2023

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS
PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021-2026

**I. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2021-2026**

PEJABAT : ESSELON II

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian	Tanpa Satuan	-	-	65 (B)	66 (B)	67 (B)	68 (B)
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian	Tanpa Satuan	88,20 (A)	88,64 (A)	89,09 (A)	89,53 (A)	89,98 (A)	90,43 (AA)
2	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian	Tanpa Satuan	-	85	100	100	100	100
3	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)	Rp. Triliyun	2,90	2,98	3,04	3,10	3,16	3,23

PEJABAT : ESSELON III

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian	Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	%	-	-	100	100	100	100
		Ketepatan Waktu Pelaporan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Tanpa Satuan	-	-	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan	0 Delay Pelaporan
		Persentase Kinerja Bidang yang Tercapai	%	-	-	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)	91%-100% (Sangat Baik)

2.	Meningkatnya Inovasi Dinas Pertanian	Jumlah Inovasi Dinas Pertanian	Jenis	-	1	1	1	1	1
	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Pertanian	Ton	468.149	503.846	514.094	524.579	535.308	546.287
		- Padi	Ton	146.141	156.430	161.123	165.957	170.936	176.064
		- Jagung	Ton	189.636	208.011	212.171	216.414	220.742	225.157
		- Cabe Merah	Ton	5.513	5.042	5.092	5.143	5.195	5.247
		- Bawang Merah	Ton	172	146	148	149	151	152
		- Durian	Ton	11.046	18.482	18.667	18.853	19.042	19.232
		- Manggis	Ton	4.321	4.695	4.742	4.789	4837	4.886
		- Jeruk	Ton	4.930	4.465	4.510	4.555	4.600	4.646
		- Jengkol	Ton	3.660	5.747	5.804	5.862	5.921	5.980
		- Kelapa Sawit	Ton	83.414	79.850	80.649	81.455	82.270	83.092
		- Kelapa Dalam	Ton	3.494	3.154	3.185	3.217	3.249	3.282
		- Kopi	Ton	2.327	2.373	2.397	2.421	2.445	2.469
		- Gambir	Ton	4.005	5.944	6.004	6.064	6.125	6.186
		- Pala	Ton	980	912	921	930	940	949
		- Daging Sapi	Ton	1.686	1.703	1.720	1.737	1.755	1.772
		- Daging Kerbau	Ton	45	46	46	47	47	48
		- Daging Kambing	Ton	35	35	35	36	36	36
		- Daging Ayam	Ton	4.379	4.423	4.467	4.512	4.557	4.602
		- Daging Itik	Ton	116	117	118	119	120	122
		- Telur Ayam	Ton	1.170	1.182	1.193	1.205	1.217	1.229
		- Telur Itik	Ton	1.080	1.090	1.101	1.112	1.123	1.135
4.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana Pertanian	Persentase Kelompok Tani Yang Menerapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) Budidaya Pertanian	%	50,75	52,88	53,14	53,49	53,61	53,72
		Produktivitas Pertanian Per hektar Per Tahun	Kw/ha	58,14	68,92	70,17	71,47	72,53	73,62

		Persentase Ternak Unggul	%	7,00	27,31	28,00	28,70	29,41	30,15
5.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Prasarana Pertanian	Jumlah Indeks Pertanaman Per Tahun	kali	1,30	1,62	1,70	1,79	1,88	2,00
		Persentase Pengaduan/ Saran Sektor Pertanian yang ditindaklanjuti	%	-	-	100	100	100	100
		Persentase Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	%	-	-	100	100	100	100
6.	Meningkatnya Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Hewan/Ternak	%	2,32	3,87	4,28	4,47	4,68	4,91
		Persentase Produk Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) Untuk Dikonsumsi	%	100	100	100	100	100	100
7.	Meningkatnya Pengendalian dan Penanganan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	%	100	100	100	100	100	100
8.	Meningkatnya Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usaha Pertanian yang Memiliki Izin Usaha	%	29,60	30,27	32	34	37	40
9.	Meningkatnya Kapasitas Penyuluhan Pertanian	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian Yang Naik Kelas	Unit	-	-	1	1	1	1
		Jumlah Kelompok Tani yang Naik Kelas	Unit	25	219	100	100	100	100

PEJABAT : ESSELON IV

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Kualitas	Persentase Pengaduan/	%	-	-	100	100	100	100

	Layanan Internal Dinas Pertanian	Saran yang ditindaklanjuti							
		Persentase Dokumen Publik dan Dipublish	%	-	-	95	96	97	98
		Persentase Pelayanan Kepegawaian dan Perkantoran	%	-	-	100	100	100	100
2	Meningkatnya Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Dinas Pertanian	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Dokumen	-	-	47	47	47	47
3	Meningkatnya Kapasitas SDM Dinas Pertanian	Jumlah ASN Dinas Pertanian yang mengikuti Pendidikan dan Latihan	Orang	-	-	5	5	5	5
4.	Meningkatnya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang dilakukan	Laporan	12	12	12	12	12	12
5.	Meningkatnya Penggunaan Benih Unggul Pertanian	Persentase Penggunaan Benih Unggul Pertanian	%	52,50	57,50	61,92	66,25	70,58	75,00
		- Padi	%	15	20	23	25	27	30
		- Jagung	%	100	100	100	100	100	100
		- Cabe Merah	%	35	45	50	55	60	65
		- Bawang Merah	%	75	80	85	90	95	100
		- Durian	%	5	55	60	65	70	75
		- Manggis	%	50	55	60	65	70	75
		- Jeruk	%	50	55	60	65	70	75
		- Jengkol	%	15	20	25	30	35	40
		- Kelapa Sawit	%	75	80	85	90	95	100
		- Kelapa Dalam	%	50	55	60	65	70	75
		- Kopi	%	75	80	85	90	95	100

		- Gambir	%	40	45	50	55	60	65
6.	Meningkatnya Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Bibit, Pakan dan Obat Ternak	Persentase Ketersediaan Bibit Ternak Unggul (IB)	%	33,33	33,33	33,33	40,00	45,00	50,00
		Jumlah Ternak yang Tersedia	Ekor	5.944	849	10.075	15.075	20.075	25.075
		- Sapi	Ekor	148	9	75	75	75	75
		- Ayam Buras	Ekor	-	-	5.000	7.500	10.000	12.500
		- Itik	Ekor	5.796	840	5.000	7.500	10.000	12.500
		Jenis Pakan Ternak yang tersedia	Jenis	-	-	5	5	5	5
		Persentase Pengawasan Kios atau Pengencer Obat Hewan yang dilakukan	%	-	-	100	100	100	100
7.	Meningkatnya Perlindungan Lahan Pertanian	Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Yang Dilindungi	Ha	22.746,1	22.747,1	22.748,1	22.749,1	22.750,1	22.751,1
8.	Meningkatnya Fungsi Prasarana Pertanian	Persentase Lahan Sawah Beririgasi Baik	%	-	-	74,77	75,35	75,93	76,51
		Persentase Jalan Pertanian yang berkondisi baik	%	-	-	78,86	83,86	88,86	93,86
		Persentase Prasarana Pelayanan Pertanian yang berkondisi baik	%	-	-	54,84	61,83	68,83	75,83
9.	Meningkatnya Pengelolaan Rumpun Ternak/Galur Ternak	Jumlah Jenis Rumpun Ternak/Galur Ternak yang dikelola	Jenis	-	-	2	2	2	2
10.	Meningkatnya Pencegahan, Pengendalian dan Pemberantasan	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit	%	2,32	3,95	4,35	4,55	4,76	5,00

	Penyakit Hewan	Hewan Menular (PHM)							
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan dan Rabies	%	2,45	2,52	3,23	3,33	3,45	3,57
11.	Meningkatnya SDM Medik dan Paramedik Veteriner	Persentase Petugas Medik dan Paramedik Veteriner yang memiliki kompetensi	%	-	-	58,33	75,00	91,67	100,00
		Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan yang memenuhi standar layanan Tipe B	Unit	-	-	2	5	7	7
12.	Meningkatnya Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah check point yang aktif	Unit	1	1	2	3	3	3
		Jumlah jenis produk hewan yang di awasi	Jenis	5	5	5	5	5	5
13.	Meningkatnya Jaminan Pangan Asal Hewan	Jumlah Unit Usaha yang memenuhi persyaratan teknis hygiene sanitasi untuk mendapatkan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner/NKV	Unit	-	-	-	1	2	3
14.	Meningkatnya Pengendalian Hama dan Penyakit Tumbuhan	Persentase pengendalian serangan hama dan penyakit tumbuhan	%	100	100	100	100	100	100
15.	Meningkatnya Penanganan Pasca Bencana Pertanian	Luas Area Lahan yang dapat ditangani dari pasca bencana pertanian	Ha	-	350	350	350	350	350

16.	Meningkatnya Usaha Pertanian Yang Mengajukan Rekomendasi Izin Usaha	Jumlah Usaha Pertanian yang Mengajukan Permohonan Rekomendasi/ Daftar Izin Usaha	Unit	7	4	10	12	14	16
		- Rice Milling Unit (RMU)	Unit	1	-	3	4	5	6
		- Toko Pertanian	Unit	6	4	4	5	6	7
		- Pabrik Kelapa Sawit	Unit	-	-	1	1	1	1
		- Toko Obat Hewan/ Petshop	Unit	-	-	2	2	2	2
17.	Meningkatnya Pengawasan Usaha Pertanian	Jumlah Usaha Pertanian yang diawasi	Unit	140	145	155	160	165	170
		- Rice Milling Unit (RMU)	Unit	10	15	20	25	30	35
		- Toko Pertanian	Unit	121	121	121	121	121	121
		- Pabrik Kelapa Sawit	Unit	9	9	9	9	9	9
		- Toko Obat Hewan/ Petshop	Unit	-	-	5	5	5	5
18.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Sumber Daya Manusia Penyuluhan Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya	%	-	-	28,07	35,24	41,58	46,39
		Persentase Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang Mampu Memenuhi 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)	%	100	100	100	100	100	100
19.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Petani	Jumlah Kelembagaan Petani yang	Unit	1012	1091	1100	1110	1115	1120

		Ditingkatkan Kapasitasnya							
20.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Persentase Sarana Penyuluhan Pertanian Yang berkondisi baik	%	40,50	59,17	79,17	83,33	87,00	92,50
		Persentase Prasarana Penyuluhan Pertanian Yang berkondisi baik	%	60,00	72,38	76,88	81,50	88,13	91,88

II. Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Agar seluruh stakeholder Dinas Pertanian memiliki persepsi yang sama terhadap IKU Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait definisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan penanggung jawab/pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing-masing IKU Dinas Pertanian tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	:	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian merupakan nilai yang dikeluarkan oleh Tim Asesor Internal Pemerintah Daerah dengan melakukan penilaian secara mandiri berdasarkan ketentuan yang berlaku berdasarkan pada pemenuhan nilai pengungkit 60% dan hasil 40%. Nilai ini setiap tahunnya diberikan oleh Inspektorat Daerah sebagai Assesor sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB no 26 tahun 2020.
Formulasi	:	Hasil penilaian Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian oleh Tim Penilai Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Sumber data	:	Laporan hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Daerah.
Penanggung jawab	:	Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian

Level dalam Renstra	:	Indikator Kinerja Utama Sasaran
---------------------	---	---------------------------------

Definisi Operasional	: Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan penilaian terhadap rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah..
Formulasi	: Hasil penilaian laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Dinas Pertanian oleh Tim Penilai Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Sumber data	: Laporan Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah.
Penanggung jawab	: Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Nilai Kematangan Inovasi Dinas Pertanian

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Nilai Kematangan Inovasi merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri. Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah.
Formulasi	: Hasil penilaian saat pengentrian kriteria inovasi pada aplikasi IGA.
Sumber data	: Aplikasi Pengentrian Kriteria Inovasi dari Kemendagri .
Penanggung jawab	: Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

4. Nilai PDRB Sektor Pertanian (ADHK)

Level dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran
Definisi Operasional	: Indikator Nilai PDRB Pertanian (ADHK) digunakan untuk melihat besarnya kontribusi sektor pertanian dalam PDRB.
Formulasi	: Jumlah PDRB dari sektor pertanian berdasarkan ADHK dalam 1 (satu) tahun.

Sumber data : Penghitungan dan Publikasi oleh Badan Pusat Statistik.
 Penanggung jawab : Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

5. Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal.
 Definisi Operasional : Merupakan persentase kelengkapan laporan yang disampaikan terkait Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi yaitu pada bidang program dan perencanaan serta keuangan yang dipimpin oleh sekretaris.
 Formulasi :

$\frac{\text{Jumlah laporan yang disampaikan}}{\text{Jumlah laporan yang harus disampaikan}} \times 100\%$
--

 Sumber data : Laporan Bidang program dan perencanaan serta keuangan.
 Penanggung jawab : Sekretaris Dinas Pertanian

6. Ketepatan Waktu Pelaporan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal
 Definisi Operasional : Merupakan waktu yang harus ditepati saat menyampaikan laporan terkait.
 Formulasi : Waktu terakhir penyampaian laporan sesuai permintaan dari instansi terkait.
 Sumber data : Instansi terkait yang meminta laporan sesuai surat.
 Penanggung jawab : Sekretaris Dinas Pertanian.

7. Persentase Kinerja Bidang yang Tercapai

Level dalam Renstra : Kinerja Taktikal.
 Definisi Operasional : Merupakan akumulasi persentase capaian kinerja seluruh bidang pada fase pengukuran akhir tahun termasuk sekretariat yang kemudian di rata-ratakan.
 Formulasi :

$\frac{\text{Jumlah persentase capaian kinerja bidang}}{\text{Jumlah bidang}}$
--

 Sumber data : Laporan Pengukuran Capaian Kinerja Akhir Tahun
 Penanggung jawab : Sekretaris Dinas Pertanian dan Seluruh Kepala Bidang.

8. Jumlah Inovasi Dinas Pertanian

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal.
Definisi Operasional	:	Merupakan inovasi yang disusun oleh seluruh eselon III di Dinas Pertanian dan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan Kepala Badan untuk diusahakan memenuhi nilai kematangan sehingga menjadi Inovasi Bapedalitbang yang akan dinilai dalam ajang IGA Kemendagri setiap tahunnya..
Formulasi	:	Jumlah Inovasi setiap eselon III.
Sumber data	:	Sekretariat dan Bidang pada Dinas Pertanian.
Penanggung jawab	:	Sekretariat dan Bidang pada Dinas Pertanian.

9. Jumlah Produksi Pertanian

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal.
Definisi Operasional	:	Indikator jumlah produksi pertanian adalah jumlah produksi komoditi unggulan tanaman pangan (padi dan jagung), komoditi unggulan tanaman hortikultura (cabe merah, bawang merah, durian, manggis, jeruk, jengkol), komoditi unggulan perkebunan (kelapa sawit, kelapa dalam, kopi, gambir dan pala, daging (sapi, kerbau, kambing, ayam dan itik) dan telur (ayam dan itik) dalam 1 (satu) tahun.
Formulasi	:	Jumlah produksi pertanian per komoditi dalam 1 (satu) tahun.
Sumber data	:	Data Statistik Pertanian.
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Bidang Perkebunan, Kepala Bidang Peternakan dan Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner.

10. Persentase Kelompok Tani Yang Menerapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) Budidaya Pertanian

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal.
Definisi Operasional	:	Indikator Persentase Kelompok Tani Yang Menerapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) Budidaya Pertanian menunjukan banyaknya Kelompok Tani yang telah menerapkan SOP (Standar Operasional

		Prosedur) dalam melakukan budidaya pertanian.			
Formulasi	:	<table><tr><td>Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Pemerintah Tahun n</td><td rowspan="2">x 100%</td></tr><tr><td>Jumlah Kelompok Tani Tahun n</td></tr></table>	Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Pemerintah Tahun n	x 100%	Jumlah Kelompok Tani Tahun n
Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Pemerintah Tahun n	x 100%				
Jumlah Kelompok Tani Tahun n					
Sumber data	:	Dinas Pertanian.			
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Bidang Perkebunan, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Kepala Bidang Peternakan, Kepala Bidang Penyuluhan dan Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.			

11. Produktivitas Pertanian Per hektar Per Tahun

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal.		
Definisi Operasional	:	Indikator Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun adalah hasil persatuan atau satu lahan yang panen dari seluruh luas lahan yang dipanen dalam 1 (satu) tahun yaitu Padi dan jagung		
Formulasi	:	<table><tr><td>Jumlah Total Produksi Pertanian Tahun n</td></tr><tr><td>Luas Panen Tahun n</td></tr></table>	Jumlah Total Produksi Pertanian Tahun n	Luas Panen Tahun n
Jumlah Total Produksi Pertanian Tahun n				
Luas Panen Tahun n				
Sumber data	:	Penghitungan dan Publikasi oleh Badan Pusat Statistik.		
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.		

12. Persentase Ternak Unggul

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal.	
Definisi Operasional	:	Indikator Persentase ternak unggul menunjukkan meningkatnya pertambahan populasi ternak melalui kelahiran hasil Inseminasi Buatan (IB) yang dilaksanakan oleh petugas Inseminasi Buatan (Inseminator).	
Formulasi	:	<table border="1"><tr><td>$\frac{\text{Jumlah kelahiran ternak hasil Inseminasi Buatan (IB) Tahun } n}{\text{Jumlah kelahiran Tahun } n} \times 100\%$</td></tr></table>	$\frac{\text{Jumlah kelahiran ternak hasil Inseminasi Buatan (IB) Tahun } n}{\text{Jumlah kelahiran Tahun } n} \times 100\%$
$\frac{\text{Jumlah kelahiran ternak hasil Inseminasi Buatan (IB) Tahun } n}{\text{Jumlah kelahiran Tahun } n} \times 100\%$			
Sumber data	:	Laporan kelahiran ternak	
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Peternakan dan Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.	

13. Jumlah Indeks Pertanaman Per Tahun

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal.		
Definisi Operasional	:	Indikator Jumlah Indeks Pertanaman Per Tahun perbandingan luas areal tanam terhadap luas areal lahan yang dimiliki selama beberapa kali tanam dalam setahun.		
Formulasi	:	<table><tr><td>Luas tanam padi sawah Tahun n</td></tr><tr><td>Luas Sawah Tahun n</td></tr></table>	Luas tanam padi sawah Tahun n	Luas Sawah Tahun n
Luas tanam padi sawah Tahun n				
Luas Sawah Tahun n				
Sumber data	:	Data Statistik Pertanian.		
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.		

14. Persentase Pengaduan/Saran Sektor Pertanian yang ditindaklanjuti

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal.	
Definisi Operasional	:	Indikator Persentase Pengaduan/Saran Sektor Pertanian yang ditindaklanjuti adalah untuk mengukur tingkat penyelesaian terhadap semua pengaduan/saran yang masuk ke Balai Penyuluhan Pertanian, Pusat Kesehatan Hewan, Rumah Potong Hewan dan Prasarana Pertanian Lainnya oleh masyarakat tani terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pertanian sektor pertanian.	
Formulasi	:	<table border="1"><tr><td>$\frac{\text{Jumlah pengaduan/saran sektor pertanian yang ditindaklanjuti Tahun } n}{\text{Jumlah Pengaduan/Saran Sektor Pertanian Tahun } n} \times 100\%$</td></tr></table>	$\frac{\text{Jumlah pengaduan/saran sektor pertanian yang ditindaklanjuti Tahun } n}{\text{Jumlah Pengaduan/Saran Sektor Pertanian Tahun } n} \times 100\%$
$\frac{\text{Jumlah pengaduan/saran sektor pertanian yang ditindaklanjuti Tahun } n}{\text{Jumlah Pengaduan/Saran Sektor Pertanian Tahun } n} \times 100\%$			
Sumber data	:	Total Pengaduan/Saran yang masuk dan ditindaklanjuti oleh Balai Penyuluhan Pertanian, Pusat Kesehatan Hewan, Rumah Potong Hewan dan Prasarana Pertanian Lainnya.	
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Penyuluhan, Kepala Bidang Peternakan dan Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.	

15. Persentase Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal.
Definisi Operasional	:	Indikator Persentase Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak adalah suatu wilayah agroekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif pemerintahan dan mempunyai potensi untuk

		pengembangan bibit dari jenis, rumpun, atau galur ternak tertentu.			
Formulasi	:	<table><tr><td>Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak Yang Dikelola Tahun n</td><td rowspan="2">x 100%</td></tr><tr><td>Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak Tahun n</td></tr></table>	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak Yang Dikelola Tahun n	x 100%	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak Tahun n
Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak Yang Dikelola Tahun n	x 100%				
Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak Tahun n					
Sumber data	:	Kepala Bidang Peternakan.			
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Peternakan.			

16. Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Hewan/Ternak

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal.	
Definisi Operasional	:	Indikator Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Hewan/Ternak menunjukkan penurunan seluruh kejadian penyakit hewan/ternak yang menyerang hewan/ternak di Kabupaten Pesisir Selatan.	
Formulasi	:	<table border="1"><tr><td>$\frac{(\text{Jumlah kejadian penyakit/kasus penyakit hewan/ternak Tahun } n) - (\text{Jumlah kejadian penyakit hewan/ternak Tahun } n-1)}{\text{Jumlah kejadian penyakit hewan/ternak Tahun } n-1} \times 100\%$</td></tr></table>	$\frac{(\text{Jumlah kejadian penyakit/kasus penyakit hewan/ternak Tahun } n) - (\text{Jumlah kejadian penyakit hewan/ternak Tahun } n-1)}{\text{Jumlah kejadian penyakit hewan/ternak Tahun } n-1} \times 100\%$
$\frac{(\text{Jumlah kejadian penyakit/kasus penyakit hewan/ternak Tahun } n) - (\text{Jumlah kejadian penyakit hewan/ternak Tahun } n-1)}{\text{Jumlah kejadian penyakit hewan/ternak Tahun } n-1} \times 100\%$			
Sumber data	:	Laporan Kejadian Penyakit Hewan/Ternak.	
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.	

17. Persentase Produk Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) Untuk Dikonsumsi

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal.	
Definisi Operasional	:	Indikator Persentase Produk Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) Untuk Dikonsumsi adalah tersedianya produk pangan hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) untuk dikonsumsi oleh masyarakat dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat veteriner.	
Formulasi	:	<table border="1"><tr><td>$\frac{\text{Jumlah Produk Pangan Hewani Yang Diawasi Tahun } n}{\text{Jumlah Produk Pangan Yang Beredar Tahun } n} \times 100\%$</td></tr></table>	$\frac{\text{Jumlah Produk Pangan Hewani Yang Diawasi Tahun } n}{\text{Jumlah Produk Pangan Yang Beredar Tahun } n} \times 100\%$
$\frac{\text{Jumlah Produk Pangan Hewani Yang Diawasi Tahun } n}{\text{Jumlah Produk Pangan Yang Beredar Tahun } n} \times 100\%$			
Sumber data	:	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.	
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.	

18. Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal.
---------------------	---	-------------------

Definisi Operasional	:	Indikator Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian adalah upaya pengendalian dan penanggulangan setiap bencana pertanian yang terjadi seperti serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), kekeringan dan banjir terhadap tanaman pangan dan hortikultura serta tanaman perkebunan dalam 1 (satu) tahun .	
Formulasi	:	<table border="1"><tr><td>$\frac{\text{Jumlah Bencana Pertanian yang Dikendalikan dan Ditanggulangi Tahun } n}{\text{Jumlah Bencana Pertanian yang terjadi Tahun } n} \times 100\%$</td></tr></table>	$\frac{\text{Jumlah Bencana Pertanian yang Dikendalikan dan Ditanggulangi Tahun } n}{\text{Jumlah Bencana Pertanian yang terjadi Tahun } n} \times 100\%$
$\frac{\text{Jumlah Bencana Pertanian yang Dikendalikan dan Ditanggulangi Tahun } n}{\text{Jumlah Bencana Pertanian yang terjadi Tahun } n} \times 100\%$			
Sumber data	:	Laporan Peringatan Bahaya (LPB) Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Bencana Pertanian.	
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Kepala Bidang Perkebunan.	

19. Persentase Usaha Pertanian yang Memiliki Izin Usaha

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal.	
Definisi Operasional	:	Indikator Persentase Usaha Pertanian yang Memiliki Izin Usaha menunjukkan jumlah persentase usaha pertanian yang telah memiliki izin usaha dalam 1 (satu) tahun.	
Formulasi	:	Jumlah usaha pertanian yang mengajukan rekomendasi izin usaha pertanian dalam 1 (satu) tahun.	
Sumber data	:	<table border="1"><tr><td>$\frac{\text{Jumlah Usaha Pertanian Yang Telah Memiliki Izin Usaha Tahun } n}{\text{Jumlah Usaha Pertanian Tahun } n} \times 100\%$</td></tr></table>	$\frac{\text{Jumlah Usaha Pertanian Yang Telah Memiliki Izin Usaha Tahun } n}{\text{Jumlah Usaha Pertanian Tahun } n} \times 100\%$
$\frac{\text{Jumlah Usaha Pertanian Yang Telah Memiliki Izin Usaha Tahun } n}{\text{Jumlah Usaha Pertanian Tahun } n} \times 100\%$			
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Bidang Perkebunan, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Kepala Bidang Peternakan dan Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.	

20. Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian Yang Naik Kelas

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal.
Definisi Operasional	:	Indikator Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian yang Naik Kelas adalah jumlah Balai Penyuluhan Pertanian yang naik klasifikasi dari pratama, madya, utama dan aditama dalam 1 (satu) tahun.

Formulasi	:	Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian yang naik kelas dalam 1 (satu) tahun.
Sumber data	:	Bidang Penyuluhan Pertanian.
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian.

21. Jumlah Kelompok Tani yang Naik Kelas

Level dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal.
Definisi Operasional	:	Indikator Jumlah Kelompok Tani yang Naik Kelas adalah jumlah kelompok tani yang naik klasifikasi dari pemula, lanjut, madya dan utama dalam 1 (satu) tahun.
Formulasi	:	Jumlah Kelompok Tani yang naik kelas dalam 1 (satu) tahun.
Sumber data	:	Bidang Penyuluhan Pertanian.
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian.

22. Persentase Pengaduan/Saran yang ditindaklanjuti

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional	
Definisi Operasional	:	Merupakan pengaduan atau saran yang disampaikan oleh eksternal maupun internal di social media, media cetak maupun melalui kotak saran yang telah disediakan.	
Formulasi	:	<table border="1"><tr><td>$\frac{\text{Jumlah pengaduan/saran yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan/saran}} \times 100\%$</td></tr></table>	$\frac{\text{Jumlah pengaduan/saran yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan/saran}} \times 100\%$
$\frac{\text{Jumlah pengaduan/saran yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan/saran}} \times 100\%$			
Sumber data	:	Sosial media, Media cetak, Kotak saran	
Penanggung jawab	:	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian.	

23. Persentase Dokumen Publik dan Dipublish

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional	
Definisi Operasional	:	Merupakan dokumen publik yang di publish sesuai ketentuan PPID.	
Formulasi	:	<table border="1"><tr><td>$\frac{\text{Jumlah dokumen publik yang di publish}}{\text{Jumlah dokumen publik}} \times 100\%$</td></tr></table>	$\frac{\text{Jumlah dokumen publik yang di publish}}{\text{Jumlah dokumen publik}} \times 100\%$
$\frac{\text{Jumlah dokumen publik yang di publish}}{\text{Jumlah dokumen publik}} \times 100\%$			
Sumber data	:	Dinas Pertanian	
Penanggung jawab	:	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian	

24. Persentase Pelayanan Kepegawaian dan Perkantoran

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Merupakan pelayanan yang terkait dengan administrasi kepegawaian dan pelayanan

yang terkait dengan perkantoran seperti sarana prasarana, operasional kantor dan sejenisnya.

Formulasi	:	<table><tr><td>Jumlah pelayanan yang dilakukan</td><td></td></tr><tr><td>Jumlah pelayanan yang harus dilakukan</td><td>x 100%</td></tr></table>	Jumlah pelayanan yang dilakukan		Jumlah pelayanan yang harus dilakukan	x 100%
Jumlah pelayanan yang dilakukan						
Jumlah pelayanan yang harus dilakukan	x 100%					
Sumber data	:	Dinas Pertanian				
Penanggung jawab	:	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian				

25. Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Merupakan dokumen yang harus disediakan oleh sekretariat yang secara teknis disusun oleh bagian program dan perencanaan dan keuangan. Dokumen yang disusun oleh bagian program dan perencanaan sebanyak 31 dokumen, bagian keuangan sebanyak 12 dokumen dan aset sebanyak 4 dokumen.
Formulasi	:	Jumlah Dokumen
Sumber data	:	Dinas Pertanian
Penanggung jawab	:	Perencana di bagian program dan perencanaan, Analis Keuangan Pusat dan Daerah di bagian keuangan dan Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian

26. Jumlah ASN Dinas Pertanian yang mengikuti Pendidikan dan Latihan

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional
Definisi Operasional	:	Dinas Pertanian secara tidak langsung menerima dampak dari meningkatnya kapasitas ASN yang di diklatkan oleh BKPSDM. Dengan meningkatnya kapasitas ASN maka pelayanan yang diberikan akan semakin baik.
Formulasi	:	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan latihan.
Sumber data	:	Dinas Pertanian dan BKPSDM.
Penanggung jawab	:	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian

27. Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang dilakukan

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi Operasional	:	Indikator Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang dilakukan adalah upaya untuk mengukur

		tingkat pengawasan terhadap penggunaan sarana pertanian yaitu alat dan mesin pertanian serta sarana pertanian lainnya.
Formulasi	:	Jumlah laporan pengawasan penggunaan sarana pertanian yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun.
Sumber data	:	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Bidang Perkebunan, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Kepala Bidang Peternakan, dan Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Bidang Perkebunan, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Kepala Bidang Peternakan, dan Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

28. Persentase Penggunaan Benih Unggul Pertanian

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.	
Definisi Operasional	:	Indikator Persentase Penggunaan Benih Unggul Pertanian merupakan perbandingan penggunaan benih unggul dan bersertifikat yang digunakan oleh petani dalam melakukan budidaya tanaman terhadap total penggunaan benih oleh petani dalam 1 (satu) tahun.	
Formulasi	:	<table border="1"><tr><td>$\frac{\text{Jumlah benih unggul dan bersertifikat yang digunakan}}{\text{Jumlah penggunaan benih}} \times 100\%$</td></tr></table>	$\frac{\text{Jumlah benih unggul dan bersertifikat yang digunakan}}{\text{Jumlah penggunaan benih}} \times 100\%$
$\frac{\text{Jumlah benih unggul dan bersertifikat yang digunakan}}{\text{Jumlah penggunaan benih}} \times 100\%$			
Sumber data	:	Laporan Penggunaan Benih dari Pengawas Benih Tanaman (PBT).	
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Kepala Bidang Perkebunan.	

29. Persentase Ketersediaan Bibit Ternak Unggul (IB)

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.		
Definisi Operasional	:	Indikator ketersediaan bibit ternak unggul adalah perbandingan jumlah ketersediaan bibit ternak unggul (straw) terhadap jumlah aseptor (ternak betina produktif).		
Formulasi	:	<table><tr><td>Jumlah Bibit Ternak Unggul tersedia</td><td>x 100%</td></tr></table>	Jumlah Bibit Ternak Unggul tersedia	x 100%
Jumlah Bibit Ternak Unggul tersedia	x 100%			

		Jumlah betina produktif
Sumber data	:	Bidang Peternakan.
Penanggung jawab	:	Bidang Peternakan.

30. Jumlah Ternak yang Tersedia

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi Operasional	:	Indikator ternak yang tersedia adalah jumlah ternak yang disalurkan ke Kelompok Tani dalam rangka meningkatkan populasi dan produksi ternak.
Formulasi	:	Jumlah ternak yang disalurkan ke Kelompok Tani Tahun n
Sumber data	:	Bidang Peternakan.
Penanggung jawab	:	Bidang Peternakan.

31. Jenis Pakan Ternak yang tersedia

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi Operasional	:	Pakan ternak adalah semua bahan pakan yang bisa diberikan dan bermanfaat bagi ternak serta tidak menimbulkan pengaruh negatif terhadap tubuh ternak. Ada 5 jenis pakan ternak yaitu 1) pakan kasar, 2) pakan penguat/ konsentrat, 3) mineral, 4) vitamin, dan 5) pakan tambahan. Indikator jenis pakan ternak yang tersedia adalah jenis pakan ternak yang tersedia dan aman untuk dikonsumsi oleh ternak.
Formulasi	:	Jenis pakan ternak yang tersedia dalam 1 (satu) tahun.
Sumber data	:	Bidang Peternakan.
Penanggung jawab	:	Bidang Peternakan.

32. Persentase Pengawasan Kios atau Pengencer Obat Hewan yang dilakukan

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi Operasional	:	Indikator Persentase Pengawasan Kios atau Pengencer Obat Hewan yang dilakukan adalah pengawasan yang dilakukan terhadap kios atau pengencer obat hewan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan agar obat hewan yang

		beredar ditengah masyarakat terjamin keamanan dan kualitasnya sehingga aman dikonsumsi oleh hewan/ternak.	
Formulasi	:	<table border="1"><tr><td>$\frac{\text{Jumlah Kios yang diawasi}}{\text{Total Kios atau Pengencer obat hewan yang ada}} \times 100\%$</td></tr></table>	$\frac{\text{Jumlah Kios yang diawasi}}{\text{Total Kios atau Pengencer obat hewan yang ada}} \times 100\%$
$\frac{\text{Jumlah Kios yang diawasi}}{\text{Total Kios atau Pengencer obat hewan yang ada}} \times 100\%$			
Sumber data	:	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.	
Penanggung jawab	:	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.	

33. Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Yang Dilindungi

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi Operasional	:	Indikator Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Yang Dilindungi adalah upaya perlindungan atau mempertahankan keberadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah agar tidak dilakukan alih fungsi/penggunaan bukan untuk pertanian tanaman pangan oleh masyarakat.
Formulasi	:	Luas lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dilindungi.
Sumber data	:	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.
Penanggung jawab	:	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

34. Persentase Lahan Sawah Beririgasi Baik

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.	
Definisi Operasional	:	Indikator Persentase Lahan Sawah Beririgasi Baik adalah kondisi lahan sawah yang memiliki kecukupan akan kebutuhan air untuk budidaya tanaman pertanian yang terintergrasi dengan irigasi primer dan sekunder.	
Formulasi	:	<table><tr><td>$\frac{\text{Total lahan sawah beririgasi baik tahun } n}{\text{total luas sawah}} \times 100\%$</td></tr></table>	$\frac{\text{Total lahan sawah beririgasi baik tahun } n}{\text{total luas sawah}} \times 100\%$
$\frac{\text{Total lahan sawah beririgasi baik tahun } n}{\text{total luas sawah}} \times 100\%$			
Sumber data	:	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.	
Penanggung jawab	:	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.	

35. Persentase Jalan Pertanian yang berkondisi baik

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi Operasional	:	Indikator Persentase Jalan Pertanian yang berkondisi baik adalah kondisi jalan pertanian yang layak dan bisa

dimanfaatkan oleh petani untuk lancarnya proses pengangkutan sarana produksi dan hasil pertanian oleh petani.

Formulasi	:	$\frac{\text{Total panjang jalan pertanian yang berkondisi baik}}{\text{Total panjang jalan pertanian yang ada}} \times 100\%$
Sumber data	:	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.
Penanggung jawab	:	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

36. Persentase Prasarana Pelayanan Pertanian yang berkondisi baik

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi Operasional	:	Indikator Persentase Prasarana Pelayanan Pertanian yang berkondisi baik adalah kondisi prasarana pelayanan pertanian yang layak dan bisa dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanian seperti Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), dan Rumah Potong Hewan (RPH).
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah Prasarana Pelayanan Pertanian yang berkondisi baik}}{\text{Total jumlah Prasarana Pelayanan Pertanian}} \times 100\%$
Sumber data	:	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.
Penanggung jawab	:	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

37. Jumlah Jenis Rumpun Ternak/Galur Ternak yang dikelola

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi Operasional	:	Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya dan Galur ternak yang selanjutnya disebut galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan. Indikator Jumlah Jenis Rumpun Ternak/Galur Ternak yang dikelola adalah jumlah Rumpun Ternak/Galur Ternak yang dilakukan pengelolaannya dalam 1 (satu) tahun.
Formulasi	:	Jumlah Rumpun Ternak/Galur Ternak yang dikelola dalam 1 (satu) tahun.

Sumber data : Bidang Peternakan.
 Penanggung jawab : Bidang Peternakan.

38. Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (PHM)

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional.
 Definisi Operasional : Indikator Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (PHM) adalah penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular SE, Jembrana, LSD yang menyerang hewan/ternak .

Formulasi :

$\frac{\text{Jumlah kejadian penyakit/kasus penyakit hewan menular Tahun } n - \text{Jumlah kejadian penyakit menular Tahun } n - 1}{\text{Jumlah kejadian penyakit hewan menular Tahun } n - 1} \times 100\%$
--

Sumber data : Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 Penanggung jawab : Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

39. Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan dan Rabies

Level dalam Renstra : Kinerja Operasional.
 Definisi Operasional : Indikator Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan dan Rabies adalah penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan dan rabies yang dibawa oleh Hewan Pembawa Rabies (HPR) seperti anjing, kucing, kera/monyet melalui kasus gigitan terhadap manusia.

Formulasi :

$\frac{\text{Jumlah kejadian penyakit/kasus penyakit hewan dan rabies Tahun } n - \text{Jumlah kejadian penyakit hewan dan rabies Tahun } n - 1}{\text{Jumlah kejadian penyakit hewan dan rabies Tahun } n - 1} \times 100\%$

Sumber data : Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 Penanggung jawab : Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

40. Persentase Petugas Medik dan Paramedik Veteriner yang memiliki kompetensi

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.			
Definisi Operasional	:	Indikator Persentase Petugas Medik dan Paramedik Veteriner yang memiliki kompetensi adalah jumlah Petugas Medik yang telah memiliki sertifikat Sterility Control (SC) dan Paramedik Veteriner yang telah memiliki sertifikat Asisten Teknis Reproduksi Ternak (ATR).			
Formulasi	:	<table><tr><td>Jumlah Petugas Medik dan Paramedik Veteriner yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis Tahun n</td><td rowspan="2">x 100%</td></tr><tr><td>Jumlah Petugas Medik dan Paramedik Veteriner</td></tr></table>	Jumlah Petugas Medik dan Paramedik Veteriner yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis Tahun n	x 100%	Jumlah Petugas Medik dan Paramedik Veteriner
Jumlah Petugas Medik dan Paramedik Veteriner yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis Tahun n	x 100%				
Jumlah Petugas Medik dan Paramedik Veteriner					
Sumber data	:	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.			
Penanggung jawab	:	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.			

41. Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan yang memenuhi standar layanan Tipe B

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi Operasional	:	Laboratorium Kesehatan Hewan adalah Laboratorium yang menyelenggarakan pemeriksaan terhadap sampel hewan atau ternak, guna keperluan diagnosa lebih lanjut. Indikator Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan yang memenuhi standar layanan Tipe B menunjukkan jumlah kondisi laboratorium kesehatan hewan yang telah memenuhi standar layanan tipe B.
Formulasi	:	Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan yang memenuhi standar layanan Tipe B dalam 1 (satu) tahun.
Sumber data	:	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
Penanggung jawab	:	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

42. Jumlah check point yang aktif

Level dalam Renstra	: Kinerja Operasional.
Definisi Operasional	: Check Point adalah sebagai pos pemeriksaan lalu lintas keluar dan masuk ternak dari dan ke dalam Kabupaten Pesisir Selatan. Indikator Jumlah check point yang aktif adalah kondisi jumlah check point yang aktif dalam 1 (satu) tahun.
Formulasi	: Jumlah cek point yang aktif dalam 1 (satu) tahun.
Sumber data	: Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
Penanggung jawab	: Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

43. Jumlah jenis produk hewan yang di awasi

Level dalam Renstra	: Kinerja Operasional.
Definisi Operasional	: Produk hewan adalah segala macam bahan yang didapatkan dari tubuh hewan, seperti daging, lemak, darah, susu, telur, enzim, dan sebagainya. Indikator Jumlah jenis produk hewan yang di awasi adalah jenis produk hewan yang beredar ditengah masyarakat yang dilakukan pengawasan peredarannya oleh petugas peternakan.
Formulasi	: Jumlah produk hewan yang dilakukan pengawasan dalam 1 (satu) tahun.
Sumber data	: Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
Penanggung jawab	: Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

44. Jumlah Unit Usaha yang memenuhi persyaratan teknis hygiene sanitasi untuk mendapatkan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner/NKV

Level dalam Renstra	: Kinerja Operasional.
Definisi Operasional	: Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner/NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan hygiene sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal hewan (Permentan Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005). Indikator Jumlah Unit Usaha yang memenuhi persyaratan teknis hygiene sanitasi untuk mendapatkan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner/NKV adalah jumlah unit usaha yang telah memenuhi

		persyaratan teknis hygiene sanitasi untuk mendapatkan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner/NKV dalam 1 (satu) tahun.
Formulasi	:	Jumlah usaha yang memenuhi persyaratan teknis hygiene sanitasi untuk mendapatkan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner/NKV dalam 1 (satu) tahun.
Sumber data	:	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
Penanggung jawab	:	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

45. Persentase pengendalian serangan hama dan penyakit tumbuhan

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi Operasional	:	Indikator Persentase pengendalian serangan hama dan penyakit tumbuhan menunjukkan persentase luas serangan hama dan penyakit tumbuhan yang dapat dikendalikan dari total luas serangan hama dan penyakit tumbuhan yang terjadi dalam 1 (satu) tahun.
Formulasi	:	$\frac{\text{Luas Lahan yang dikendalikan}}{\text{Total luas serangan OPT}} \times 100\%$
Sumber data	:	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Bidang Perkebunan.
Penanggung jawab	:	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Bidang Perkebunan.

46. Luas Area Lahan yang dapat ditangani dari pasca bencana pertanian

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi Operasional	:	Indikator Luas Area Lahan yang dapat ditangani dari pasca bencana pertanian adalah penanganan luas areal yang terdampak pasca terjadinya bencana pertanian seperti banjir, kekeringan, longsor dan lain-lain yang terjadi dalam 1 (satu) tahun terhadap tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
Formulasi	:	Luas area yang dapat ditangani dalam 1 (satu) tahun.
Sumber data	:	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Bidang Perkebunan.
Penanggung jawab	:	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Bidang Perkebunan.

47. Jumlah Usaha Pertanian yang Mengajukan Permohonan Rekomendasi/Daftar Izin Usaha

Level dalam Renstra	: Kinerja Operasional.
Definisi Operasional	: Indikator Jumlah Usaha Pertanian yang Mengajukan Permohonan Rekomendasi/ Daftar Izin Usaha menunjukkan jumlah usaha pertanian yang mengajukan permohonan rekomendasi/daftar izin usaha ke Dinas Pertanian dalam 1 (satu) tahun.
Formulasi	: Jumlah usaha pertanian yang mengajukan rekomendasi izin usaha pertanian dalam 1 (satu) tahun.
Sumber data	: Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Perkebunan, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Bidang Peternakan dan Bidang Kewan dan Kesmavet.
Penanggung jawab	: Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Perkebunan, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Bidang Peternakan dan Bidang Kewan dan Kesmavet.

48. Jumlah Usaha Pertanian yang diawasi

Level dalam Renstra	: Kinerja Operasional.
Definisi Operasional	: Indikator jumlah usaha pertanian yang diawasi adalah menunjukkan jumlah usaha pertanian yang dilakukan pengawasan terhadap operasionalnya maupun dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya baik itu izin usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan maupun kewan dan kesmavet yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun.
Formulasi	: Jumlah usaha pertanian yang diawasi dalam 1 (satu) tahun.
Sumber data	: Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Perkebunan, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Bidang Peternakan dan Bidang Kewan dan Kesmavet.
Penanggung jawab	: Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Perkebunan, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Bidang Peternakan dan Bidang Kewan dan Kesmavet.

49. Persentase Sumber Daya Manusia Penyuluhan Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya

Level dalam Renstra	: Kinerja Operasional.
Definisi Operasional	: Indikator Persentase Sumber Daya Manusia Penyuluhan Pertanian yang Meningkatkan

		Kapasitasnya adalah jumlah penyuluh pertanian yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)		
Formulasi	:	<table><tr><td>Total penyuluh pertanian lapangan yang telah mengikuti pelatihan teknis sampai tahun n (PNS dan P3K)</td></tr><tr><td> Total penyuluh pertanian x 100% </td></tr></table>	Total penyuluh pertanian lapangan yang telah mengikuti pelatihan teknis sampai tahun n (PNS dan P3K)	Total penyuluh pertanian x 100%
Total penyuluh pertanian lapangan yang telah mengikuti pelatihan teknis sampai tahun n (PNS dan P3K)				
Total penyuluh pertanian x 100%				
Sumber data	:	Bidang Penyuluhan Pertanian.		
Penanggung jawab	:	Bidang Penyuluhan Pertanian.		

50. Persentase Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang Mampu Memenuhi 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi Operasional	:	9 (Sembilan) indikator kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) meliputi : 1) Tersusunnya program penyuluhan pertanian sesuai dengan kebutuhan petani, 2) Tersusunnya rencana kerja penyuluhan pertanian di wilayah kerja masing-masing, 3) Tersedianya data peta wilayah untuk pengembangan teknologi spesifik lokasi sesuai dengan pengwilayahan komoditas unggulan, 4) Terdiseminasinya informasi teknologi pertanian secara merata dan sesuai dengan kebutuhan petani, 5) Tumbuh kembangnya keberdayaan dan kemandirian petani, kelompok tani, kelompok usaha/asosiasi dan usaha formal (koperasi dan usaha formal lainnya), 6.) Terwujudnya kemitraan usaha antara petani dengan pengusaha yang saling menguntungkan, 7) Terwujudnya akses petani ke lembaga keuangan, informasi sarana produksi pertanian dan pemasaran, 8) Meningkatnya produktifitas agribisnis komoditas unggulan di masing-masing wilayah kerja, dan 9.) Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani di masing-masing wilayah. Indikator Persentase Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang Mampu Memenuhi 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) adalah menunjukan kondisi dimana Penyuluh

Pertanian Lapangan (PPL) mampu untuk dapat memenuhi ataupun melaksanakan seluruh indikator kinerjanya sebagai Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun.

Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah penyuluh pertanian lapangan yang Mampu Memenuhi 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)}}{\text{Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)}} \times 100\%$
Sumber data	:	Bidang Penyuluhan Pertanian.
Penanggung jawab	:	Bidang Penyuluhan Pertanian.

51. Jumlah Kelembagaan Petani yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi Operasional	:	Indikator Jumlah Kelembagaan Petani yang Ditingkatkan Kapasitasnya adalah jumlah kelompok tani yang difasilitasi dengan bantuan Pemerintah dan sekaligus dilakukan pembinaan dan pendampingan.
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Pemerintah}}{\text{Jumlah Kelompok Tani}} \times 100\%$
Sumber data	:	Bidang Penyuluhan Pertanian.
Penanggung jawab	:	Bidang Penyuluhan Pertanian.

52. Persentase Sarana Penyuluhan Pertanian Yang berkondisi baik

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi Operasional	:	Indikator Persentase Sarana Penyuluhan Pertanian Yang berkondisi baik menunjukkan keadaan sarana penyuluhan pertanian yang layak digunakan dalam memberikan pelayanan kepada petani/kelompok tani.
Formulasi	:	$\frac{\text{Jumlah sarana yang layak digunakan}}{\text{Jumlah sarana yang tersedia}} \times 100\%$
Sumber data	:	Bidang Penyuluhan Pertanian.
Penanggung jawab	:	Bidang Penyuluhan Pertanian.

53. Persentase Prasarana Penyuluhan Pertanian Yang berkondisi baik

Level dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
---------------------	---	----------------------

- Definisi Operasional : Indikator Persentase Prasarana Penyuluhan Pertanian Yang berkondisi baik menunjukkan keadaan prasarana penyuluhan pertanian yang layak digunakan dalam memberikan pelayanan kepada petani/ kelompok tani.
- Formulasi :

Jumlah prasarana yang layak digunakan
Jumlah prasarana yang tersedia

 x 100%
- Sumber data : Bidang Penyuluhan Pertanian.
- Penanggung jawab : Bidang Penyuluhan Pertanian.

KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



MADRIANTO, S.Hut., M.H.

Pembina/IVa

NIP. 19780519 200501 1 009